ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah pada pengembangan usaha penangkaran benih kelapa di Kabupaten Gorontalo serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh pengusaha dalam penerapan kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksplanatori. Data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi terhadap enam informan kunci yang terdiri dari petani, pelaku usaha pengolahan kelapa, serta pihak instansi pemerintah. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah memberikan dukungan dalam bentuk kerja sama lintas sektor, penyediaan benih unggul, dan kemudahan akses terhadap bantuan, namun implementasinya belum berjalan optimal. Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya minat petani untuk terlibat dalam penangkaran, serta rumitnya prosedur sertifikasi benih. Selain itu, kelemahan dalam koordinasi antar lembaga dan kurangnya pelatihan teknis juga turut menghambat efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan finansial untuk menciptakan ekosistem usaha benih kelapa yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Kebijakan Pemerintah, Penangkar Benih Kelapa, Pengembagan Usaha, Sektor Pertanian*

Abstract

This study aims to analyze government policy on developing coconut seedling cultivation in Gorontalo Regency and identify the obstacles entrepreneurs face in implementing the policy.The method used is qualitative research with a descriptive-explanatory approach. Data was collected through interviews, questionnaires, and document studies of six key informants: farmers, coconut processing entrepreneurs, and government officials. The analysis technique used is descriptive analysis to describe the conditions of the policy and its implementation in the field.

The study results indicate that the government policy has provided support through cross-sectoral cooperation, provision of high-quality seeds, and easier access to assistance; however, its implementation has not been optimal. Some challenges identified in the field include limited budgets, low farmer interest in participating in seed production, and the complexity of seed certification procedures. In addition, weaknesses in coordination between institutions and a lack of technical training also hamper the effectiveness of the policy. Therefore, institutional capacity building and financial support are needed to create a sustainable coconut seed business ecosystem.

Keywords: *Government Policy; Coconut Seed Breeders; Business Development; Agricultural Sector*